

Machasin, dkk.

ISLAM

DALAM GORESAN PENA BUDAYA



ISLAM DALAM GORESAN PENA BUDAYA

Penulis: Machasin, dkk.

Editor: Syifa'un Nafsiyah, Thoriq Tri Prabowo, Sujadi, dan Ening Herniti

Tata Sampul: Ahmad

Tata Isi: Aira

Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, November 2019

Penerbit

DIVA Press

(Anggota IKAPI)

Sampangan Gg. Perkutut No.325-B

Jl. Wonosari, Baturetno

Banguntapan Yogyakarta

Telp: (0274) 4353776, 081804374879

Fax: (0274) 4353776

E-mail: redaksi_divapress@yahoo.com

sekred2.divapress@gmail.com

Blog: www.blogdivapress.com

Website: www.divapress-online.com

Bekerja sama dengan

FORUM SILATURAHMI

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Jl. Laksda Adisutjipto Yogyakarta Indonesia

Telp. +62274513949

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Machasin, dkk.

Islam dalam Goresan Pena Budaya/Machasin, dkk.; editor, Syifa'un Nafsiyah, Thoriq Tri Prabowo, Sujadi, dan Ening Herniti—cet. 1—Yogyakarta: DIVA Press, 2019

246 hlmn; 16 x 24 cm

ISBN 978-602-391-840-9

1. Religion & Social Sciences

II. Syifa'un Nafsiyah, Thoriq Tri Prabowo, Sujadi, dan Ening Herniti

I. Judul

Daftar Isi

Kata Pengantar ❦❦ 3

Daftar Isi ❦❦ 7

ULAMA PEREMPUAN DALAM SEJARAH ISLAM

MACHASIN ❦❦ 9

INDONESIAN MUSLIMS IN GERMANY: FROM YMAE TO IWKZE.V.

SUJADI ❦❦ 31

BUDI UTOMO DAN KEBANGKITAN NASIONAL

SYAMSUL ARIFIN ❦❦ 45

SYAIKH AHMAD KHATIB AL MINANGKABAWI DAN PEMBAHARUAN ISLAM DI MINANGKABAU

ABAD XIX-XX

ZUHROTUL LATIFAH ❦❦ 71

DEMOKRASI DESA: ANTARA KUMIS DAN ANALISIS

BADRUN ❦❦ 99

MODIN: PELAYAN UMAT DAN PENJAGA TRADISI (MENYELAMI SEJARAH HIDUP MBAH AHMAD
MUSNADI 1912-1997)

IMAM MUHSIN ❦❦ 111

KOMUNITAS DIFABEL DALAM SEJARAH DAN HISTORIOGRAFI AWAL ISLAM

NURUL HAK ❦❦ 141

KEPATUHAN MALAIKAT DAN PERSETERUAN ADAM DAN IBLIS (KISAH DALAM Q.S. AL-A'RAF: 11-25 DAN Q.S. TAHA: 115-123)

MOH. HABIB  161

SEJARAH EJAAN BAHASA INDONESIA (DARI MASA PEMERINTAHAN BELANDA HINGGA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO)

ENING HERNITI  179

KOLABORASI PUSTAKAWAN ANTAR DAN LINTAS PROFESI: SEBUAH OPINI

THORIQ TRI PRABOWO  207

INTERNALISASI NILAI-NILAI PROFETIK DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BERBASIS INKLUSIF DI PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ANIS MASRURI  221

DEMOKRASI DESA: ANTARA KUMIS DAN ANALISIS

BADRUN

Dosen Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

TEMPO dulu, kaum pria biasa mencukur kumis dengan menggunakan pisau lipat, panjang mata pisau yang panjang berkilat mencapai belasan sentimeter. Sering pisau cukur tersebut melukai bagian wajah pria yang bercukur kumis. Kemudian, Gillette menemukan bentuk mata pisau yang jauh lebih praktis, yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan silet. Dibantu dengan gagang yang berbentuk khas, silet bisa digunakan bercukur tanpa terlalu banyak kemungkinan menimbulkan luka. Sejak itu, budaya bercukur dalam masyarakat menjadi berubah. Kini muncul lagi *rezor*, sejenis pencukur yang bekerja secara elektrik, yang lebih memungkinkan keamanan dalam bercukur kumis. Sebagian masyarakat pria mulai beralih dari silet ke *rezor*. Apakah peralihan kebiasaan ini merupakan gejala perubahan sosial-budaya masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan sains dan teknologi?

Secara sederhana, begitulah paparan mengenai pergeseran budaya dikalangan masyarakat desa. Budaya masyarakat urban industri yang dibawa pulang oleh masyarakat desa, secara perlahan-lahan tapi pasti, telah mengikis warisan-warisan lama yang sarat dengan kearifan tradisi. Sementara budaya kota, yang padat dengan simbol-simbol

konsumerisme dan arogansi perilaku (sosial), secara latah diadopsi dan digunakan sebagai *mode*. Sebab, menurut sebagian besar dari mereka, budaya seperti itu dipandang sebagai pemaknaan dan sekaligus pengejawantahan dari semangat modernitas. Tampaknya, telah terjadi “salah-kaprah” dalam pola pikir yang digunakan.

Salah satu dampak perubahan yang melanda masyarakat desa adalah menyangkut “nilai-nilai” demokrasi desa. Demokrasi desa, menurut Suhartono, merupakan demokrasi asli.¹Yakni kultur demokrasi yang masih “orisinil”, belum “terkontaminasi” oleh budaya politik.² Dalam budaya masyarakat seperti itu, sangat mudah kita jumpai proses pengambilan keputusan dan persetujuan bulat (musyawarah), tanpa melalui kondisi yang berbelit-belit dan penuh intrik. Hal ini, di samping karena adanya ketulusan dan kemauan yang jujur dalam bermusyawarah tanpa disertai *interest-interest* personal,³juga terutama oleh kenyataan jumlah warga masyarakat yang masih terbatas.

Tampaknya, cukup banyak nilai-nilai demokrasi desa yang telah mengalami erosi. Misalnya, budaya gotong-royong, *sambata*, *slametan*, sikap *tepo-seliro*(*take and give*), *ambengan*, dan lain sebagainya. Bahkan dalam skala yang lebih makro, budaya *rembugan* (kumpulan) yang biasa secara kontinyu diselenggarakan setiap bulan sekali, sebagai arena refleksi dan introspeksi, juga telah mengalami proses peminggiran. Yang terjadi kemudian adalah, bahwa segala persoalan yang ada, kendati itu menyangkut hajat hidup dan kepentingan seluruh warga desa, cukup dipercayakan kepada lurah dan *carik*-nya. Budaya musyawarah, rupanya telah punah dan dianggap tidak penting lagi. Padahal, dibalik itu semua, sesungguhnya terdapat makna yang lebih esensial, sekedar dari persoalan yang menjadi tema perkumpulan. Sebab, dengan budaya semacam ini,

¹ Suhartono, dkk, *Parlemen Desa: Dinamika DPR Kelurahan Dan DPR Gotong-Royong*, (Yogyakarta: Laper Pustaka, 2000), hlm, 28.

² Yang dimaksud dengan budaya politik adalah dalam pengertian modern; suatu budaya yang semata-mata berorientasi kekuasaan atau yang sarat dengan kepentingan golongan.

³ Hal ini misalnya nampak dalam budaya masyarakat “warung kopi”. Yaitu sekelompok orang yang mempunyai kebiasaan *nongkrong* di sebuah warung sederhana. Di area ini biasanya dialog dengan gaya akrab dan cara seenaknya. Tidak ada keseriusan yang ekstrim. Dengan kata lain, ia merupakan refleksi sosial mengenai kekeluargaan ditengan keadaan yang penuh dengan berbagai ketimpangan dan krisis (sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya). Lihat, Cristanto P Rahardjo, *Masyarakat “Warung Kopi” Dan Hegemoni Politik Jawa*, PRISMA, edisi 3 Maret 1997, hlm 89.

kemanunggalan (kemenyatuan) dan semangat kekeluargaan akan tetap terpelihara.

Pertanyaan yang layak diajukan adalah bagaimana mengatasi persoalan semacam itu? Bagaimana menggairahkan kembali kehidupan nilai-nilai demokrasi di pedesaan? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita mendiskusikan terlebih dahulu dinamika teori dan transformasi demokrasi modern. Hal ini dimaksudkan agar mendiskusikan signifikansi nilai-nilai demokrasi desa dalam format yang masih “sederhana”, kita dapat memberikan analisis-analisis yang lebih proporsional, berdasarkan kajian perbandingan dengan wajah demokrasi modern, yang tampaknya pada akhir dasawarsa 70-an telah mulai banyak digugat dan dipertanyakan oleh para ilmuwan politik.

B. TIGA TRANSFORMASI DEMOKRASI

Robert A. Dahl, dalam salah satu karyanya yang berjumlah dua jilid, membagi transformasi demokrasi ke dalam tiga fase.⁴ Fase pertama adalah munculnya bentuk negara-kota yang demikratis. Transformasi demikrasi kedua adalah dari negara kota ke negara-bangsa. Dan transformasi ketiga adalah suatu bentuk demokrasi yang akan mengantarkan umat manusia kepada tahap kehidupan politik masa depan. Dalam hubungan ini, Dahl tampaknya belum menemukan model yang pasti untuk format demokrasi masa depan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk lebih jelasnya, ada baiknya ketiga fase transformasi demokrasi tersebut kita diskusikan terlebih dahulu.

1. Transformasi Demokrasi Pertama: Munculnya Bentuk Negara Kota

Bagi Dahl, demokrasi itu adalah suatu sistem politik dimana para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan lainnya sebagai orang-orang yang sama dilihat dari segi politik, dan mereka itu secara bersama-sama adalah berdaulat, dan memiliki

⁴ Lihat. Robert A. Dahl, *Demokrasi Dan ParaPengeritiknya*, alih bahasa. A. Rahman Zaenuddin, (Jakarta, : Yayasan Obor), 1992. 2 jilid

segala kemampuan, sumber daya dan lembaga-lembaga mereka diperlukan demi untuk memerintah diri mereka sendiri.⁵ Gagasan demokrasi seperti ini pertama kali muncul dalam sejarah umat manusia di paruh pertama abad ke-5 S.M, dikalangan masyarakat Yunani, atau lebih tepat lagi, dikalangan orang-orang Athena.⁶

Meskipun orang Yunani. Apalagi orang Athena, merupakan bagian yang sangat kecil jika dibandingkan dengan seluruh umat manusia, dan juga mendiami wilayah yang dihuni umat manusia, dan juga mendiami wilayah yang demikian kecil dibanding dengan luasnya wilayah yang dihuni umat manusia diatas permukaan bumi, namun menurut Dahl, disanalah terjadinya apa yang dinamakan suatu transformasi demokrasi pertama, dimana para warga negara merasakan sebagai orang yang sama, dan sama-sama pula berdaulat dalam memerintah dan menjalankan roda pemerintahan.

Demokrasi pertama ini adalah demokrasi kecil ruang lingkungannya, berbentuk langsung, dengan pengertian tidak mengenal demokrasi perwakilan. Terdapat kesan bahwa menurut pandangan orang Athena, demokrasi perwakilan itu bukanlah demokrasi sama sekali, karena dalam demokrasi perwakilan orang tidak lagi bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara langsung, akan tetapi harus menyerahkan pekerjaannya untuk orang lain.⁷ Dengan demikian, seakan-akan ia telah menyerahkan hak kedaulatannya itu untuk orang lain.

Namun, dalam membicarakan dan mengkaji demokrasi langsung yang murni ini, kita dihadapkan pada berbagai masalah yang menjadikan kita harus berfikir ulang tentang segala sesuatu yang dinamakan demokrasi langsung ini. Dilihat dari segi istilah (akar katanya), demokrasi itu berarti pemerintahan oleh rakyat, karena kata-kata itu pada hakikatnya terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratia* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan.⁸

⁵ Ibid., I: 1

⁶ J.H. Raper, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm, 25.

⁷ Ibid

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 50.

Masalah pertama yang dihadapkan pada kita adalah siapakah *demos* itu? Dalam pandangan rakyat Athena, bahwa yang dinamakan *demos* adalah rakyat dari sebuah polis atau kota kecil yang merupakan bagian dari dunia Hellena yang luas. Masyarakat Hellena tidak dipandang sebagai rakyat.⁹ Bagi mereka, yang namanya rakyat hanyalah orang Athena, Corinth, Sparta, dan kota-kota lainnya. Orang-orang inilah yang dapat dinamakan rakyat, sehingga berhak memiliki otonomi politik mereka sendiri, bukan orang Hellena sebagai keseluruhan.¹⁰

Masalah kedua adalah menyangkut kandungan atau isi rakyat itu dalam masing-masing kota yang merupakan lokusnya. Apakah semua orang dalam kota Athena dapat dinamakan sebagai rakyat? Ternyata, menurut Dahl, tidak semua orang Athena itu berhak menyandang predikat rakyat. Hanya sebagian kecil saja orang yang berpredikat rakyat. Jumlah mereka paling banyak diperkirakan hanya sepuluh persen dari keseluruhan jumlah warga negara-kota Athena. Kaum wanita, kaum profesional (karena dianggap terlalu sibuk), para budak, dan tentu saja, anak-anak, semua tidak termasuk dalam kategori rakyat.¹¹ Pada titik ini, rakyat tampaknya merupakan predikat yang terhormat dan *prestise*.

2. Transformasi Demokrasi Kedua: dari Negara Kota ke Negara Bangsa

Dahl mengemukakan bahwa perhatiannya yang dinyatakan secara eksplisit adalah mengenai persamaan politik, sedangkan perhatiannya yang sesungguhnya bersifat implisit adalah berkaitan dengan masalah-masalah kebebasan, perkembangan manusia dan nilai manusia. Dalam pandangan Dahl, apa yang kita cari sekarang ini adalah sebuah masyarakat berskala luas yang terdiri dari orang-orang yang dipandang dari segi politik adalah sama, yakni warga negara yang sama dari sebuah negara.¹²

⁹ Ini berarti kebalikan dengan pemahaman rakyat dalam pemahaman masyarakat modern. Menurut masyarakat modern, rakyat identik dengan *wong cilik*. Bagi orang Athena, rakyat merupakan predikat yang sangat terhormat dan istimewa.

¹⁰ Dahl, *Op.cit*, I: 179

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid.*, II:2

Dalam *setting* masyarakat yang bercorak plural, dan berada dalam lingkup negarayang sangat luas inilah demokrasi dalam negara-bangsa diharapkan pada problem-problem tentang persamaan, hak asasi manusia, kebebasan dan lain sebagainya.¹³ Karena itulah kemudian lahir berbagai macam ragam demokrasi, yang antara satu dengan lainnya berbeda aplikasinya.¹⁴ Hal ini nampak jelas dari berbagai macam demokrasi yang berkembang. Di Indonesia mengenal demokrasi Pancasila, di Amerika Serikat ada istilah demokrasi liberal, dan masih banyak lagi, seperti demokrasi konstitusional, semokrasi sosialis,¹⁵ dst. Karena itulah saat ini para ilmuwan politik terus mencari bentuk baru teori demokrasi dalam negara-bangsa.

3. Transformasi Demokrasi Ketiga: Mencari Model Demokrasi Masa Depan

Salah satu masalah yang dipikir Dahl pada akhir bukunya adalah kenyataan bahwa apa saja yang telah dicapai dalam transformasi demokrasi kedua, yang berbentuk negara-bangsa, tidak dapat lagi memberikan tempat yang layak kepada gagasan-gagasan demokrasi sendiri. Dalam rangka inilah Dahl mengemukakan istilah yang disebut poliarkhi. Dalam poliarkhi, demokrasi itu belum dapat diwujudkan secara sempurna, namun ia memiliki sarana-sarana yang memungkinkan untuk lebih dekat kepada demokrasi.¹⁶

Bagi Dahl, meskipun kekuatan gagasan dan praktik demokrasi itu selalu memudar dalam perkembangan sejarah, maka di abad ke dua puluh ini dapat diperhatikan bahwa negara-negara demokrasi itu, kalau ada, hanya terdapat di sebagian negara saja. Ia menyebutkan empat perubahan pokok yang dihadapi demokrasi dewasa ini.

¹³ Lyman Tower Sargent, *Indeologi Politik Kontemporer*, alih bahasa. Sahat Simamora, (Jakarta: Bina Aksara, 1986) hlm. 55

¹⁴ A. Hoogerwrf, *Politikologi*, alih bahasa. R,L Tobing, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985), hlm. 199.

¹⁵ Budiardjo, *Op.cit*, hlm. 56-64.

¹⁶ Dahl, *Op.cit*, II: 22.

Pertama, adalah masalah skala. Keputusan-keputusan penting telah melebar dari negara-bangsa ke sistem pengaruh dan kekuasaan yang bersifat trans-nasional. *Kedua*, adalah bahwa istilah “pemerintah oleh rakyat”, umumnya telah digunakan oleh rezim-rezim yang bukan demokrasi untuk mengabsahkan pemerintahannya yang tidak demokratis. *Ketiga*, negara-negara demokrasi, dengan masyarakat majemuk dinamis dan modern, dengan segala keberhasilannya, namun juga sekaligus dengan berbagai kegagalan yang dideritanya, telah memberikan gambaran kepada seluruh dunia tentang bagaimana kira-kira bentuk masa depan yang terhampar di depan kita. *Keempat*, besarnya pengaruh dan kekuasaan negara-negara yang memiliki pemerintahan poliarkhi dan masyarakat majemuk yang dinamis dan modern, kepada seluruh dunia dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁷ Berdasarkan semua itu, maka Dahl berpendapat telah tiba saatnya bagi transformasi ketiga demokrasi. Namun demikian, kendati transformasi ketiga sudah cukup mendesak, transformasi tersebut belum dapat mengemukakan dengan pasti bentuk yang akan diambil di masa depan.¹⁸

Pertanyaan yang muncul adalah apakah ini suatu pertanda bahwa masyarakat manusia akan kembali lagi pada model demokrasi kuno ala Athena? Apakah mungkin bahwa model-model *paguyuban* yang bersifat terbatas dan “primitif” dalam nilai-nilai demokrasi pedesaan akan coba dipakai? Inilah sejumlah pertanyaan tampaknya akan terus menggantung dalam bena dan pikiran kita.

C. DEMOKRASI DESA

Demokrasi desa sebagaimana dikatakan oleh Hatta, mengandung tiga ciri: rapat (tempat rakyat bermusyawarah/bermufakat) hak rakyat untuk mengadakan protes, dan cita-cita tolong-menolong.¹⁹ Konsep ini tidak dimaksudkan sebagai suatu pengakuan dan penerimaan bahwa di banyak desa berkembang demokrasi yang dimaksud. Bahkan banyak

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 167.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 184.

¹⁹ Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 37.

desa, di mana struktur tradisional yang bersifat feodal dan otokratik, masih sangat menonjol, sehingga praktik demokrasi tidak lain hanya kedok dari kepentingan segelintir orang saja. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam pengertian yang masih tradisional, jelas tertancap kuat. Ini secara kasat mata dapat dilihat pada pola perilaku dalam melakukan interaksi yang bersifat sosial dengan masyarakat sekitarnya. Sikap yang cenderung individualistik tampaknya masih sangat jauh dari pola perilaku yang dikembangkannya. Mereka rata-rata masih mau *mawas-diri* dan tidak bersikap ingin menang sendiri. Sikap inilah yang sebenarnya mengarah pada sikap “*take an give*” dalam menerima perbedaan dan segala konsekuensinya, sebagaimana nampak dalam ajaran resmi demokrasi modern.

Begitu juga halnya dengan budaya *rembugan*, sebagai arena refleksi dan introspeksi, pada tingkat yang lebih substantif, adalah pengejawentahan dari apa yang dalam literatur modern disebut sebagai rapat atau musyawarah. Hal yang menonjol dalam budaya *rembugan* dalam maknanya yang masih baku, adalah suasana santai penuh keakraban yang meliputi seluruh hadirin. Tidak ada sedikitpun perasaan tegang, apalagi perasaan *nervers*; tapi semuanya menyatu dalam suasana kemanunggalan penuh kekeluargaan. Biasanya, pembicaraan mengalir begitu saja secara spontan. Tidak ada moderator, ataupun sang pemimpin rapat. Sebab, biasanya, kendatipun pada awalnya ditunjuk seorang pemimpin rapat, pada akhirnya juga tidak terpakai. Mereka rupanya telah menyuakai gaya berbicara yang langsung. Siapa tidak suka, protes langsung fatang menyerang.

Jika dilihat secara akademis, memang tampaknya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dalam situasi semacam itu ternyata sebuah keputusan penting juga bisa diambil? Hanya ada satu jawaban, yakni kejujuran, ketulusan dan sikap kebersamaan. Hal ini, jelas berbeda sekali dengan rapat-rapat masyarakat modern di perkotaan. Atau taruhlah rapat-rapat para anggota DPR. Sebuah sikap jujur dan tulus serta kemauan untuk mencari jalan keluar sudah lenyap. Yang ada adalah ego yang membumbung tinggi untuk tampil menang, tampil beda dan mencari sensasi. Inilah yang menjadikan situasi yang sebenarnya sangat

kondusif itu justru berakhir dengan pertentangan dan hubungan-hubungan yang bersifat konfliktual.

Ciri lain yang dikemukakan Hatta tentang demokrasi desa adalah budaya tolong-menolong, seperti nampak dalam tradisi *gotong-royong*, *sambatan*, dan seterusnya. Semua itu pada dasarnya merefleksikan adanya sebuah jiwa yang stabil dan mapan, dan sama sekali jauh dari penyakit-penyakit yang bersifat patologis. Hal ini juga sekaligus mencerminkan adanya suasana hati yang teduh penuh ketenangan, sehingga menempatkan semuanya dalam konteks yang sama, sejajar dan saling menghargai. Masihkah kita menemukan suasana seperti ini dalam kultur kota yang penuh dengan arena kompetisi dan ambisi? Tampaknya kita ragu untuk mengatakan masih ada.

Dalam kegalauan para ilmuwan politik modern untuk menemukan suatu format ideal bagi kontruks demokrasi masa depan, sebagaimana telah kita diskusikan pada bagian terdahulu mengenai transformasi demokrasi ketiga, demokrasi desa rupanya menghadirkan satu topik pemikiran, yang bila dikelola secara modern, maka tidak menutup kemungkinan ia akan dapat digunakan arah berpijak bagi pengembangan paradigmatik model demokrasi masa depan sebagaimana yang dicita-citakan oleh Dahl.

D. CARA PENANGGULANGAN TERHADAP EROSI DEMOKRASI DESA

Terjadinya pergeseran budaya desa, sebagaimana telah disinggung di muka, mengakibatkan terjadinya erosi atau pengikisan terhadap warisan-warisan budaya lama sebagai kekayaan tradisi. Setidaknya, ada dua hal yang bisa dilakukan untuk membendung tingkat kemerosotan tersebut pada tingkat yang lebih parah.

Pertama, adalah konsep yang diajukan oleh Cohen dan Uphoff, yakni *empowerment* (pemberdayaan rakyat).²⁰ *Empowerment* dalam pengertian ini, bukan hanya diartikan sebagai pemberdayaan rakyat dalam pengertian politik, seperti daya bergaining, *cheks and balances* di depan proses

²⁰ Mohtar Mas'oe'd, *Negara, Kapital Dan Demokrasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994). hlm.1000.

kekuasaan lain, dan seterusnya, tetapi yang lebih penting adalah pemberdayaan dalam pengertian danya kesadaran dan pemahaman terhadap segala sesuatu yang ia terima dari dunia eksternal. Dengan pengertian seperti ini, maka warga masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang benar terhadap gejala modernisasi dan segala lingkup permasalahan yang melingkarinya. Dengan begitu, tidak ada lagi namanya sikap latah dan sikap “salah-kaprah” dalam manafsirkan modernisasi. Modernisasi, pada gilirannya, bukan dilihat dari sisi kulit luarnya dan segala simbol-simbol imitatif negatif lainnya, akan tetapi modernisasi diterjemahkan dalam konteks substantifnya, yakni suatu pola hidup untuk mengejar ketertinggalan dan mencapai kemajuan dalam konteks sains dan teknologi yang bersifat positif.

Kedua, perlu adanya langkah-langkah pembaruan atau modifikasi segala bentuk demokrasi desa, dengan wajah baru yang lebih logis, rasional dan konteks zaman. Ini bisa dilakukan tanpa harus menghilangkan bahan dasarnya. Bagaikan orang membuat, bahan tetap dari ketela, tapi proses pembuatannya bisa menggunakan peralatan modern dan kemudian dikemas dengan bentuk baru yang lebih menarik. Dengan cara ini model-model demokrasi desa akan tetap eksis tanpa harus menghilangkan atau melenyapkan unsur-unsur utama yang terkandung di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Dahl, Robert A. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, alih bahasa. A. Rahman Zaenuddin. Jakarta: Yayasan Obor, 1992 2 jilid.
- Hogerwerf, A. *Politikologi*, alih bahasa. R.L Tobing. Jakarta: Penerbit Erkanggo, 1985.
- Mas'ood, Mohtar. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Rahardjo, Cristianto P. "Masyarakat "Warung Kopi" Dan Hegemoni Politik Jawa", Prisma, edisi 3 Maret 1997.
- Rapar, J. H. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Sargent, Lyman Tower. *Ideologi Politik Kontemporer*, alih bahasa. Sahat Simamora. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Suhartono, dkk, *Parlemen Desa, Dinamika DPR Kelurahan Dan DPR Gotong-Royong*. Yogyakarta: Lapera Pustaka, 2000.
- Suseno, Frans Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi, Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia, 1997.

